

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tentang Kekuasaan Kehakiman	18
1. Latar Belakang Lahirnya Kekuasaan Kehakiman	18
2. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka	19
B. Tentang PTUN	21
1. Latar Belakang Lahirnya PTUN	21
2. Alur Penyelesaian Sengketa PTUN	25
3. Upaya Hukum Terhadap Putusan PTUN	26

C. Tentang PERMA	30
D. Tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pembangunan bandara di Kulon Progo.....	33
E. Tentang Pembatasan Upaya Hukum.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Data Penelitian	46
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	48
D. Analisis Data	49
E. Jalannya Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Dampak PERMA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara terhadap masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan bandara di Kulon Progo	51
B. Kesesuaian PERMA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung khususnya pengurangan upaya hukum dalam	

hal sengketa penetapan lokasi pembangunan bandara di Kulon Progo	62
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87